

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

Sekar Galih Asmoro, Aufarul Marom, Herbasuki Nurcahyanto

Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Haji Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Poverty is a major problem felt by the majority of countries, including Indonesia. The government minimizes the problem of poverty by doing the development and implementation of community-based program, the program that PKH. Family Hope Program is a program of social assistance conditional to family and / or poor and vulnerable person enrolled in an integrated data management poverty. This study uses a descriptive qualitative research method. The results of this study indicate that the implementation of the Family Hope Program policy in Ngaliyan District is not in accordance with the objectives of PKH and the supporting and inhibiting factors come from communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Suggestions for this research are the need for a communication strategy, take a community approach, increase the number of human resources, and increase the number of allocations and budgets.

Keywords : Beneficiary Family, The Hope Family Program, Implementation of Polic

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu negara yang terletak di Asia Tenggara yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi ialah Indonesia. Kepadatan penduduk ini mengakibatkan Indonesia memiliki masalah terbesar yakni kemiskinan. Kemiskinan telah menjadi permasalahan pokok yang dirasakan oleh mayoritas negara termasuk

Indonesia. Pada umumnya setiap negara akan berusaha untuk mengatasi kemiskinan. Akan tetapi kenyataannya mengatasi permasalahan kemiskinan bukanlah hal yang mudah. Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup tinggi.

Menurut Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta

orang, sedangkan pada bulan September 2019 jumlah penduduk miskin sebanyak 24,79 juta orang dengan demikian dalam kurun waktu bulan September 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 mengalami penambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,63 juta. Persentase penduduk miskin pada bulan Maret 2020 tercatat sebesar 9,78% mengalami peningkatan 0,56% dari bulan September 2019. Apabila dibandingkan jumlah penduduk miskin pada bulan September 2019 sebanyak 24,79 juta terhadap September 2020 sebanyak 27,55 juta maka mengalami penambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 2,76 juta (Badan Pusat Statistik, 2020).

Jumlah penduduk miskin yang semakin bertambah, menyebabkan pemerintah Indonesia kembali dihadapkan dengan banyak permasalahan. Kemiskinan akan berdampak pada meningkatnya kriminalitas, angka kematian yang tinggi, akses pendidikan tertutup, pengangguran semakin banyak dan memunculkan konflik di masyarakat (Ardyanto, 2021). Berkaitan dengan adanya kemiskinan di Indonesia,

Pemerintah melakukan pengembangan dan penyelenggaraan program yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Program tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin.

Tujuan utama yang akan dicapai dari kebijakan Program Keluarga Harapan adalah untuk mengurangi angka kemiskinan. Badan Pusat Statistik mengeluarkan angka resmi bahwa persentase penduduk miskin pada bulan Maret 2020 tercatat sebesar 9,78% mengalami peningkatan 0,56% dari bulan September 2019. Melihat data dari Badan Pusat Statistik tersebut menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan belum mampu menurunkan angka kemiskinan.

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar di dalam Basis Data Terpadu (BDT) serta memenuhi komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau

kesejahteraan sosial. Berdasarkan Basis Data Terpadu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Semarang bahwa jumlah keluarga miskin di Kecamatan Ngaliyan pada tahun 2019 sebanyak 3.371 KK / 10.905 jiwa tercatat dalam Surat Keputusan Kementerian Sosial No. 84/HUK/2019. Sedangkan pada Tahun 2020 sebanyak 4.515 KK / 14.292 jiwa tercatat dalam Surat Keputusan Kementerian Sosial No. 146/HUK/2020.

Tabel 1.
Jumlah Basis Data Terpadu Dinas Sosial Kota Semarang

No	Tahun	BDT	KPM	Persentase
1	2019	3.371	1.421	36,8%
2	2020	4.515	1.267	28,06%

Sumber: Dinas Sosial Kota Semarang, 2020.

Berdasarkan Basis Data Terpadu Dinas Sosial Kota Semarang menyatakan bahwa adanya penurunan jumlah Keluarga Penerima Manfaat sebesar 8,74 %. Kenaikan jumlah keluarga miskin yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu ternyata tidak seimbang dengan kenaikan jumlah Keluarga Penerima Manfaat. Hal ini tentu saja memunculkan beberapa permasalahan dalam implementasi kebijakan PKH.

Program Keluarga Harapan bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, akan tetapi kenaikan jumlah keluarga miskin dari tahun 2019 ke tahun 2020 tidak seimbang dengan kenaikan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Data rekapitulasi pendamping Kecamatan Ngaliyan tahun 2019 menunjukkan bahwa masih terdapat KPM PKH yang tidak memenuhi komitmen komponen yakni komponen kesehatan KPM sebanyak 25%, komponen pendidikan sebesar 18% dan pada komponen kesejahteraan sosial sebesar 17%. Hal ini dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ngaliyan belum sesuai dengan ketentuan seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018.

Adapun permasalahan dalam implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ngaliyan maka penulis tertarik untuk menggali tentang bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang serta apa saja faktor pendukung dan

penghambat implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang serta melihat faktor yang mendukung serta menghambat proses pengimplementasian Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

B. Kerangka Teori

1. Administrasi Publik

Chandler dan Plano (1998) (Rahman, 2017, p. 18), berpendapat bahwa Administrasi Publik merupakan sebuah upaya dalam mengkoordinasikan sumber daya dan para aparat publik dengan tujuan untuk menyusun, menjalankan, dan menetapkan sebuah pertimbangan dan mengelola kebijakan publik. Administrasi public dapat didefinisikan sebagai sebuah cabang seni dan juga cabang ilmu (art and science) guna mengelola seluruh kebijakan publik dalam upaya untuk

menguraikan setiap permasalahan yang terdapat di dalam masyarakat ataupun yang terdapat di dalam sebuah organisasi dan sejenisnya.

Nicolas Henry dalam (Rahman, 2017, p. 19) turut menambahkan bahwa dalam administrasi publik terdapat berbagai elemen yang rumit di dalamnya yang kemudian dikombinasikan ke dalam teori dan praktek sehingga mampu mensosialisasikan pemahaman kepada masyarakat yang merupakan instrumen yang menjalankan kebijakan yang diputuskan pemerintah serta meningkatkan repons yang ditunjukkan oleh kebijakan publik di dalam seluruh kepentingan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa administrasi publik dapat didefinisikan sebagai sebuah penggabungan yang kompleks antara teori dan praktek dalam mengelola segala upaya untuk mengkoordinasikan penerapan kebijakan yang ditetapkan pemerintah dengan menetapkan serangkaian nilai – nilai normatif yang tumbuh di dalam masyarakat. Oleh karena itu paradigma

administrasi Negara terjadi sebuah pergeseran sebanyak lima kali, yaitu:

- a. Paradigma 1 : Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)
- b. Paradigma 2 : Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937)
- c. Paradigma 3 : Administrasi sebagai Ilmu Politik (1950-1970)
- d. Paradigma 4 : Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)
- e. Paradigma 5 : Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970-sekarang)

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan susunan kata dari kata dasar publik atau umum dan kebijakan atau *policy*. Menurut Thomas R. Dye (1992) dalam (Anggara, 2018, p. 35) "*Public Policy is whatever the government choose to do or not to do*" yang mengartikan bahwa kebijakan publik merupakan pilihan pemerintah untuk dapat melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Thomas R. Dye juga menyatakan bahwa sebuah pemerintahan memilih dan melakukan sesuatu itu mempunyai sebuah tujuan, apabila pemerintah

tidak melakukan sesuatu juga mempunyai tujuannya. Kemudian, menurut Mustopodidjaja dalam (Anggara, 2018, p. 36) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah penanggulangan masalah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula yang diimplementasikan oleh otoritas yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas dan pembangunan pemerintahan negara. Di kehidupan administrasi publik, berbagai bentuk peraturan perundang – undangan telah secara resmi mendeklarasikan keputusan ini.

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan teori yang telah dipaparkan tersebut ialah kebijakan publik merupakan kebijakan yang dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah atau dapat disebut aktor publik dikarenakan pemeran-pemeran tersebut sanggup untuk menggerakkan masyarakat sehingga dapat menjalankan proses kebijakan publik sesuai dengan kewenang yang dimilikinya.

3. Implementasi Kebijakan

Secara garis besar dalam mengimplementasikan sebuah

kebijakan publik haruslah menjalani prosedur rekomendasi yang merupakan salah satu langkah yang cukup rumit, hal ini yang mendasari mengapa perealisasi kebijakan tidaklah selalu berjalan dengan sebagaimana mestinya (Kadji, 2015). Kesuksesan dalam mengimplementasikan kebijakan tentunya dipengaruhi oleh berbagai aspek yang didalamnya terdiri atas adanya pertimbangan yang dilakukan sejumlah petinggi di dalam aparatur pemerintahan, harus dilibatkannya komitmen dalam merealisasikan kebijakan, beserta mampunya menunjukkan sikap yang sesuai dengan sasaran kebijakan. Dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa model yang bisa digunakan, pada penelitian ini akan menggunakan model implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang menyatakan bahwa terdapat empat variabel atau faktor yang paling penting dalam implementasi kebijakan publik, yaitu; Implementor saling berkomunikasi secara baik, Memadainya seluruh sumber daya yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan kebijakan,

Sikap yang ditunjukkan oleh implementor beserta seluruh stimulus yang didapatkannya, Kejelasan dalam struktur birokrasi perihal pemisahan kewenangan serta struktur dalam birokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif deskriptif karena dinilai lebih cocok dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian ini akan menggambarkan proses implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Situs penelitian ini berada di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Pemilihan informan pada penelitian ini dilakukan saat peneliti sudah mulai memasuki lapangan dan selama penelitian ini berlangsung. Penentuan informan pada penelitian ini bergantung pada tugas dan fungsi informan pada posisinya saat dilaksanakannya wawancara. Data ini akan diperoleh dengan berbagai jenis teknik pengumpulan data baik itu wawancara, observasi ataupun studi kepustakaan. Teknik yang dipakai untuk menguji keabsahan adalah

teknik triangulasi. Untuk analisis interpretasi data, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan data, mereduksi data, kemudian menarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam Pasal 1 Ayat 1 mendeklarasikan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) ialah sebuah program untuk membantu masyarakat yang berkekurangan dan terdaftar sebagai keluarga yang memerlukan penanganan fakir miskin. Sesuainya kebijakan tersebut dalam menangani permasalahan ini dilihat dari seberapa jauh permasalahan mampu terselesaikan dari proses pengimplementasian kebijakan ini.

Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ngaliyan masih belum berjalan sesuai dengan regulasi yang tertulis. Hal ini ditinjau melalui tujuan PKH yang belum tersampaikan dengan baik

kepada Keluarga Penerima Manfaat. Keluarga Penerima Manfaat hanya paham berdasarkan komponen yang diterima, tapi tidak paham terhadap tujuan Program Keluarga Harapan. Pendampingan yang diperoleh selama PKH berlangsung dinilai belum baik, hal ini dibuktikan hal ini karena pendamping belum memiliki kemampuan yang baik pada saat melaksanakan pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) terdapat sebuah kendala yakni kehadiran KPM yang tidak semuanya dapat hadir karena mempunyai kesibukan masing – masing dan kendala lainnya adalah Keluarga Penerima Manfaat tidak dapat fokus dan menerima materi yang disampaikan karena satu dan lain hal. Kemudian, sasaran untuk program ini belum tepat sasaran sepenuhnya karena masih terdapat pandangan sosial yang berbeda antar implementor. Teknis pelaksanaan PKH juga masih terbilang sulit, terkhusus pada saat melaksanakan validasi data. Kendala tersebut dikarenakan Keluarga Penerima Manfaat kesulitan tidak terdapat

pendampingan dalam pengisian formulis validasi, kemudian kesulitan juga dirasakan oleh koordinator PKH Kota Semarang dimana pada saat melakukan validasi data menggunakan metode pertemuan awal adalah tidak bisa mengetahui kondisi fisik, kondisi sosial ekonomi calon penerima manfaat.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

1. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan PKH

a. Disposisi

Disposisi meliputi sistem kerja dari implementor PKH yakni UPPKH Kota Semarang. Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kota Semarang sudah menunjukkan sebuah komitmen terhadap implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH). UPPKH juga sudah memiliki loyalitas yang baik.

b. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi meliputi struktur tatanan untuk para implementor yakni dilihat berdasarkan

pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Para koordinator Kota Semarang dan pendamping ini sudah melaksanakan tupoksi sesuai dengan regulasi.

2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan PKH

a. Komunikasi

Komunikasi ini meliputi penyampaian yang dilakukan oleh implementor mengenai tujuan dari kebijakan program ini. Komunikasi yang dilakukan dalam penyampaian mengenai tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) belum disampaikan secara optimal oleh pendamping. Hal ini dikarenakan pendamping belum memiliki metode komunikasi yang efektif dan efisien.

b. Sumber Daya

Sumber daya ini meliputi dua hal yaitu sumber daya manusia dan sumber daya anggaran / financial. Hal pertama yang menjadi penghambat adalah terlihat dari sumber daya manusia untuk pendamping

masih sangat kurang. Serta alokasi dalam anggaran yang masih sangat minim sehingga tidak bisa meringankan beban KPM PKH di Kecamatan Ngaliyan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan:

1. Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang belum berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Hal ini dibuktikan dengan penyampaian perihal tujuan dari PKH yang belum sepenuhnya dipahami dengan baik dan seksama oleh KPM. Pendampingan yang diberikan belum baik. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dilaksanakan paling sedikit 1 bulan sekali ini juga belum dapat diimplementasikan dengan baik. Sasaran masih tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Teknis pelaksanaan PKH yang masih rumit.

2. Faktor pendukung implementasi kebijakan PKH ini yaitu melalui disposisi yang didapatkan dari Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kota Semarang dan struktur birokrasi dalam pembagian tugas pokok untuk setiap implementor juga sudah tepat. Selain itu terdapat faktor penghambat yaitu komunikasi yang terjadi antara pendamping dengan KPM masih belum berjalan dengan baik, serta SDM pendamping yang masih mengalami kekurangan dan minimnya alokasi anggaran PKH.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah :

1. Komunikasi antara pendamping dengan KPM pada saat penyampaian mengenai tujuan dari Program Keluarga Harapan belum efektif. Disarankan pendamping perlu melakukan pendekatan dan membuat strategi komunikasi baru untuk

menghindari kesalahpahaman dalam penyampaian mengenai tujuan Program Keluarga Harapan.

2. Penjelasan mengenai sasaran PKH masyarakat belum memahami dengan baik syarat – syarat untuk menjadi Keluarga Penerima Manfaat. Pendamping perlu melakukan pendekatan dan memberikan penjelasan secara detail bahwa untuk menetapkan sasaran dari PKH ini adalah merupakan hasil survey aparat setempat (kelurahan dan kecamatan) dan keputusan langsung dari Kementerian Sosial Pusat.
3. Pembagian sumber daya manusia untuk pendamping masih dirasa kurang seimbang. Berkaitan dengan hal ini koordinator PKH Kota Semarang perlu melakukan penambahan jumlah SDM.
4. Pembagian sumber daya anggaran yang tidak merata di setiap komponen. Berkaitan dengan hal ini pendamping seharusnya melakukan pengajuan penambahan anggaran untuk menambah jumlah bantuan

keuangan yang diterima oleh KPM.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S., 2018. *Kebijakan Publik*. Ke - 2 ed. Bandung: CV PUSTAKA SETIA
- Ardyanto, P. (2021, Februari 22). Faktor Penyebab Kemiskinan dan Dampak. Retrieved from Liputan 6: <https://hot.liputan6.com/read/4488975/7-faktor-penyebab-kemiskinan-pengertian-dan-dampaknya>
- Badan Pusat Statistik. (2020, Juni 2015). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2020*. Retrieved from BPS: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG Press .
- Rahman, M., 2017. *Ilmu Administrasi*. [Online] Available at: https://books.google.co.id/books?id=pVNtDwAAQBAJ&dq=pengertian+administrasi+publik+menurut+para+ahli+dalam+buku&hl=id&source=gbs_navlinks_s [Accessed 1 Juni 2019].
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan